

## ABSTRAK

### **MUHAMMAD BURHAN YAZID: Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Kaitannya Dengan Perda No. 16 Tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Studi di Desa Bakom Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan)**

Dalam sistem Pemerintahan Desa terdapat lembaga eksekutif yang dikepalai oleh Kepala Desa/Kuwu atau nama lain sesuai dengan adat budaya daerah masing-masing. Kepala Desa memiliki peranan yang sangat penting dalam memainkan tugasnya demi terwujudnya sebuah desa unggulan yang mampu menyejahterakan rakyatnya. Kepala Desa memiliki tiga tugas yang sangat signifikan sesuai dengan amanat PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa jo Perda No. 16 Tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan dan gambaran tentang bagaimana pelaksanaan tugas Kepala Desa di Desa Bakom Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan sebagaimana diamanatkan perda No. 16 Tahun 2006, untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Kepala Desa Bakom dalam mengemban tugasnya sehingga kedepan dibutuhkan upaya perbaikan dan restrukturisasi kelembagaan agar roda pemerintahan desa berjalan dinamis dan efektif.

Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus (case study) hukum yang sifatnya deskriptif-analitik yang didukung oleh sumber data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara menganalisa buku-buku atau kepustakaan yang relevan dengan penelitian. Kedua sumber data tersebut menjadi pegangan dan basis teori hukum normatif penulis.

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dalam skripsi ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas Kepala Desa di Desa Bakom Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan belum berjalan optimal dan tidak ada perubahan dan kemajuan yang signifikan. Dengan demikian, antara *dasollen* (Perda No. 16 Tahun 2006) dengan *dasein* (realitas) di lapangan terdapat kesenjangan. Hal ini tentu bertitik tolak pada kendala yang dihadapi Kepala Desa dalam mengemban tugasnya, diantaranya alokasi dana yang kurang memadai, lemahnya kinerja aparat desa, kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya penyuluhan, dan rendahnya tingkat pendidikan.

Kedepan, Kepala Desa Bakom harus bisa mengakomodir segala hal yang telah menjadi program desa dan mampu memainkan tugasnya yang merupakan sentral maju mundurnya sebuah pemerintahan desa. Selain itu, aparat desa dan masyarakat harus berperan aktif dalam segala hal yang telah menjadi program desa karena masyarakat merupakan subjek sekaligus objek dalam pembangunan desa.